

Community Economic Empowerment In Sangkima Village, Sangatta Selatan District, Kutai Timur Regency

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Sangkima Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur

Dormauli¹, Muh. Jamal², Moh. Taufik³

^{1,2,3} Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Vol. II, No. 02

Page : 79-89

Published : 2023

KEYWORDS

Pemberdayaan, Ekonomi Masyarakat, Kendala

CORRESPONDENCE

Phone: +6282214299090

E-mail: maulidor26@gmail.com

A B S T R A C T

The purpose of this research is to know and describe Community Economic Empowerment in Sangkima Village, South Sangatta District, East Kutai Regency. As well as to identify the obstacles found in Community Economic Empowerment in Sangkima Village, South Sangatta District, East Kutai Regency.

This type of research is a qualitative descriptive research. Data collection techniques were carried out by means of library research and field research. By using the method of observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the economic potential in Sangkima Village, South Sangatta District is agriculture, plantations, fisheries, tourism, and MSMEs.

Economic empowerment carried out by the district government is as a planner, facilitator, supervisor, and evaluator. The sub-district government acts as a facilitator between the district and village governments. And the village government includes making the community the subject and object of development, increasing community participation and carrying out empowerment such as providing training/education to the community, providing capital assistance. Constraints that occur in economic empowerment are limited capital, facilities and infrastructure and low community participation.

INTRODUCTION

Indonesia merupakan negara berkembang dengan beberapa masalah ekonomi yang belum terselesaikan, termasuk kemiskinan. Padahal negara Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia dan alam yang melimpah. Strategi dan program penanggulangan kemiskinan bergantung pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pemberdayaan ekonomi memerlukan kemampuan untuk mengelolanya, sehingga pemerintah harus berperan aktif dalam memberdayakan masyarakat agar masyarakat menjadi lebih berdaya, mandiri dan kreatif untuk menjadi

negara maju. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.

Pemberdayaan merupakan suatu cara yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan individu atau kelompok guna memanfaatkan atau mengelola sesuatu hal agar dapat meningkatkan kualitasnya dengan tujuan untuk memandirikan dan mensejahterakan masyarakat. Dalam strategi pemberdayaan masyarakat menurut Sunyoto Usman (2004:40-47) terdapat tiga aspek pokok yang perlu dilakukan dalam upaya pemberdayaan

masyarakat yaitu, pertama: Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang (enabling), yang di maksud pemerintah harus mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa setiap orang itu memiliki potensi yang dapat dikembangkan.

Memberdayakan masyarakat bertujuan untuk mengurangi kemiskinan serta mendorong masyarakat menjadi lebih aktif, penuh inisiatif dan inovatif. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 ayat 6 yang di sebutkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 masih belum optimal maka lahirlah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana memberikan harapan baru terhadap perkembangan desa.

Desa merupakan tingkatan terendah dari struktur pemerintahan di Indonesia dan menjadi agen utama yang dapat melihat potensi yang ada untuk mencapai program pemerintah yang telah dibuat. Untuk itu cara meningkatkan kualitas sumber daya yang ada maka pemerintah harus memberdayakan masyarakatnya agar mampu mengelola dan meningkatkan sumber daya yang ada. Kepala desa mempunyai tugas sebagai penyelenggara pemerintah desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 26 ayat 1, karena kepala desa adalah tumpuan pelaksanaan dan telaksananya pembangunan desa kearah yang lebih baik sesuai dengan visi-misi yang ada. Kegagalan atau keberhasilan pemberdayaan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kinerja kepala desa yang dapat

dilihat dari kemampuannya dalam mengajak masyarakat desa untuk berjalan kearah yang lebih baik lagi. Berdasarkan peraturan pemerintah No. 73 tahun 2005 tentang Kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat sebagai mitra pemerintahan kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Dalam peraturan Menteri Negri Nomor 5 Tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan disebutkan bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa untuk selanjutnya disingkat LPMD atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM Lembaga atau Wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat, sebagai mitra pemerintah desa dan lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. (BPMD 2013:15).

Salah satu Desa di Kabupaten Kutai Timur yang memiliki sumber daya yang sangat melimpah akan tetapi pengelolaanya masih kurang efektif yaitu Desa Sangkima. Desa Sangkima merupakan sebuah desa yang ada di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur. Desa Sangkima sendiri masih berstatus berkembang dan belum mandiri. Berdasarkan data BPS 2019 disebutkan bahwa desa Sangkima memiliki hasil laut yang diproduksi 564 rumah tangga yang dapat menghasilkan 784,88 ton pada tahun 2019, perkebunan 2.369,81 produksi, pertanian 448,7 ha, peternakan. Dengan rincian hasilnya yaitu : Kekayaan hasil laut seperti ikan, udang, rumput laut, kerang, dan lain sebagainya. Hasil perkebunan seperti kopi, jeruk, durian, kelapa, salak, nanas, pisang, dan lain sebagainya. Hasil pertanian seperti bayam, padi sawah, padi ladang, jagung, singkong, dan lain sebagainya. Hasil peternakan seperti sapi, kambing, ayam, bebek, itik, dan ternak lainnya. (<https://kutimkab.bps.go.id/publication/2021/0>

9/24/1c2059b0b943b78bb7f4d221/kecamatan-sangatta-selatan-dalam-angka-2019.html)

kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap kekayaan alam yang melimpah, kurangnya pemberian modal serta kurangnya sarana pendukung dan fasilitas dari desa. Padahal rencana atau program pemberdayaan ekonomi untuk mencapai kemandirian suatu desa tidak akan terwujud jika kepala desa sebagai pemerintah dan lembaga-lembaga yang ada tidak saling bekerja sama menjalankan pemerintahan dan pembangunan.

Hal lain juga dapat terlihat dari permasalahan ketidakberdayaan masyarakat dalam mengelola hasil alam, permainan harga pada sekelompok orang, masyarakat masih menggunakan sistem lama dalam melaksanakan proses jual beli yaitu sistem ambil kemudian jual, Kurangnya inovasi dan kreativitas masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan hasil perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan. seperti contoh pelatihan dalam mengolah ikan menjadi sebuah produk yang memiliki nilai jual tambah misalnya dibuat amplang, kerupuk ikan yang bervariasi. Pelatihan pembuatan produk yang berasal dari buah salak seperti manisan, keripik dan lain sebagainya. Kurangnya bantuan yang diberikan pemerintah, serta akses pemasaran yang minim.

Pemerintah juga harus membantu dalam pemasarannya agar produknya dikenal daerah lain. Jika pemerintah desa sudah memberikan inovasi, pelatihan pengolahan serta sarana yang mendukung maka masyarakat akan lebih mandiri dan hidup sejahtera, berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan, akan tetapi ini tidak hanya pemerintah saja masyarakat juga harus ikut berpartisipasi karena di desa Sangkima masyarakatnya juga kurang ikut berpartisipasi sehingga pemberdayaan ekonomi di Desa Sangkima masih kurang optimal. Hal inilah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di

Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur”.

THEORETICAL FRAMEWORK

Pemerintah Desa

Menurut pasal 1 Undang-Undang no 6 tahun 2014, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan namam lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah. Menurut peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masyarakat Menurut Soetomo (2015:25), masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara continue, sehingga terdapat relasi sosial yang terpola dan terorganisasi. Masyarakat terbentuk dari hasil interaksi yang continue antar individu. Dalam kehidupan bermasyarakat selalu dijumpai saling pengaruh mempengaruhi antar kehidupan individu dengan kehidupan bermasyarakat. Ciri-ciri dari masyarakat desa yaitu: Pertama, di dalam masyarakat pedesaan memiliki hubungan yang lebih mendalam dan jika dibandingkan dengan masyarakat pedesaan lainnya diluar batas-batas wilayahnya, Kedua, system kehidupan pada umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan, Ketiga, sebagian besar warga masyarakat hidup dari hasil pertanian, Keempat, Masyarakat tersebut bersifat homogen.

Menurut Mayor Polak dalam Abu Ahmadi (2003:96) menyebutkan bahwa masyarakat adalah wadah segenap antar hubungan sosial terdiri atas banyak sekali kolektiva-kolektiva serta kelompok dalam tiap-tiap kelompok terdiri atas kelompok-kelompok lebih baik atau sub kelompok. Sedangkan menurut Djodiguno tentang masyarakat adalah suatu kebulatan dari pada segala perkembangan dalam hidup bersama antara manusia dengan manusia (Abu Ahmadi 2003:97).

Pengertian Masyarakat

Masyarakat Menurut Soetomo (2015:25), masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara continue, sehingga terdapat relasi sosial yang terpola dan terorganisasi. Masyarakat terbentuk dari hasil interaksi yang continue antar individu. Dalam kehidupan bermasyarakat selalu dijumpai saling pengaruh mempengaruhi antar kehidupan individu dengan kehidupan bermasyarakat.

Menurut Mayor Polak dalam Abu Ahmadi (2003:96) menyebutkan bahwa masyarakat adalah wadah segenap antar hubungan sosial terdiri atas banyak sekali kolektiva-kolektiva serta kelompok dalam tiap-tiap kelompok terdiri atas kelompok-kelompok lebih baik atau sub kelompok.

Menurut John J. Macionis (dalam Dedeh Maryani 2019:2) Masyarakat adalah orang-orang yang berinteraksi dalam sebuah wilayah tertentu dan memiliki budaya bersama

Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu pelimpahan atau pemberian kekuatan (power) yang akan menghasilkan hierarki kekuatan dan ketiadaan kekuatan (Widjajanti 2011:15). Pemberian kekuatan yang dimaksud adalah transformasi pengetahuan, sikap, dan perilaku yang diberikan melalui beberapa kegiatan. Cakupan kegiatan tersebut dapat berupa bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan (Mardikanto 2013:113).

Menurut Kartasasmita Ginanjar (dalam Debora Vanda Yustin Lomboan 2021:28) mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat, yaitu upaya memberdayakan masyarakat yang dimulai dari penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan mempersiapkan masyarakat dalam mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan peningkatan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi kesulitan untuk melepaskan diri dari keterbelakangan dengan kata lain pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendamping yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat oleh Slamet diartikan sebagai proses penyuluhan pembangunan yang oleh Mardikanto (2013:100) diartikan sebagai: Proses Perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholders (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Kartasasmita (1997:11-12) pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan suatu proses, pengertian pemberdayaan sebagai suatu "proses" menunjuk pada serangkaian tindakan atau langkah-

langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan tahapan untuk mengubah pihak yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan (Sulistiyani,2004:77). Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan pemberdayaan adalah suatu kebebasan dalam memberikan gagasan, ide yang bertujuan untuk memberikan kesempatan dan menciptakan berbagai kontribusi keterampilan guna untuk mengubah kehidupan yang lebih baik atau berdaya. Dalam konteks ini, Sunyoto Usman (2004:40-47) menyebutkan tiga strategi pokok yang perlu dilakukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat yaitu: pertama menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses kedalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas

pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan program dari pemerintah berupa pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya kurang. ketiga memberdayakan juga berarti melindungi (*protecting*). Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengkerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah.

Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat terdapat 5 strategi yang dapat dilakukan khususnya melalui pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat miskin, yaitu:

a. Motivasi

Dalam hubungan ini, setiap keluarga harus dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Karena itu, setiap rumah tangga perlu didorong untuk membentuk kelompok yang merupakan mekanisme kelembagaan penting untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di desa. Kelompok ini kemudian dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan kemampuan mereka sendiri.

b. Peningkatan Kesadaran Dan Pelatihan Kemampuan

Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, perbaikan kesehatan, imunisasi, dan sanitasi. Sedangkan keterampilan-keterampilan vokasional bisa

dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Pengetahuan lokal yang biasanya diperoleh melalui pengalaman dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. Pelatihan semacam ini dapat membantu masyarakat miskin untuk menciptakan mata pencaharian sendiri atau membantu meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan di luar wilayahnya.

c. Manajemen Diri

Setiap kelompok masyarakat harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan manajemen kepemilikan masyarakat. Pada tahap awal, pendamping dari luar dapat membantu mereka dalam mengembangkan sebuah sistem. Kelompok kemudian dapat diberi wewenang penuh untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut.

d. Mobilisasi Sumberdaya

Untuk memobilisasi sumberdaya masyarakat diperlukan pengembangan metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal social. Ide ini didasari pandangan bahwa setiap orang memiliki sumbernya sendiri yang jika dihimpun, dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi secara substansial. Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian dan penggunaan sumber perlu dilakukan secara cermat sehingga semua anggota memiliki kesempatan yang sama. Hal ini dapat menjamin kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan.

e. Pembangunan Dan Pengembangan Jejaring

Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan memertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya.

METHOD

Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif, Menurut Sugiyono (2006:2) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel lain.

berikut ini fokus penelitian yang akan digunakan :

- a. Memungkinkan (*Enabling*) mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang terdapat di Desa Sangkima Kecamatan Sangatta Selatan.
- b. Memberdayakan (*Empowering*) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat di Desa Sangkima Kecamatan Sangatta Selatan.
- c. Melindungi (*Protecting*) masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang.
- d. Kendala-kendala dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur.

RESULT AND DISCUSSION

Memungkinkan (*Enabling*)

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Desa Sangkima merupakan sebuah desa tertinggal yang memiliki potensi alam yang sangat melimpah, namun kurang dalam pengelolaannya. Di desa sangkima sekelompok masyarakat seringkali mendapatkan pelatihan dan pembinaan dengan Aparat yang setingkat lebih tinggi yaitu Kecamatan. Sehingga hal ini sebenarnya mengharuskan masyarakat harus mampu mengelola potensi utama yang ada di desa Sangkima.

Desa sangkima merupakan Desa yang memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam namun, potensi yang ada saat ini belum benar-benar optimal. Jumlah penduduk Desa

Sangkima tahun 2020 sebanyak 3.166 jiwa, terdiri dari 1.664 orang laki-laki dan 1.502 orang perempuan. Desa sangkima memiliki luas wilayah 37.919,2 Ha, memiliki lahan kurang lebih 2.500 Hektar. Indahnya wisata alam modern yakni pantai teluk Lombok dengan Panjang sekitar 6 KM, Kawasan mangrove dan terumbu karang, serta potensi-potensi lain yang sangat banyak seperti dibidang pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, perternakan, perindustrian dan parawisata.

- a) Pertanian: Sayuran, Padi, Jagung, Lombok, Singkong
- b) Perikanan: Empang/tambak, Kelompok Nelayan, Petani Pengembang Rumput Laut
- c) Perdagangan: Pasar, Toko, Warung
- d) Peternakan: Ayam kampung, Itik, Sapi, Kambing, Bebek
- e) Perindustrian: Industri tempe, Amplang, Penjahit, Perbengkelan, Kerajinan.
- f) Pariwisata: Teluk Lombok, TNK, Tanjung Prancis
- g) Perkebunan: Kopi, Jeruk, Nanas, Pisang, Durian, Kelapa, Salak

Potensi yang terdapat di Desa Sangkima Kecamatan Sangatta Selatan Sebenarnya sangat luas dan banyak. namun ide-ide inovasi terbaru mengenai cara pemasaran dan pengolahan yang masih belum modern dan peran Pemerintah Desa juga belum berfungsi dengan baik yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dianggap belum berpengaruh atau tidak memiliki feedback kepada Pemerintah Desa atau Masyarakat Setempat.

Kemudian yang menyebabkan beberapa program ini kurang berjalan dengan baik karena adanya faktor penyebab dari Desa Sangkima itu sendiri juga dari masyarakatnya. Pertama, dari Pemerintah Desa memiliki keluhan dengan masalah status lahan kampung mereka berada di kawasan terlarang Taman Nasional Kutai (TNK). Akibatnya pemerintah desa tidak boleh memasukan pembangunan kawasan atau fasilitas umum tersebut dalam APBD maupun APBN.

Keterbatasan izin dari kementerian atas hak guna lahan wilayah TNK sehingga sulitnya membangun akses jalan. Sebagai jalan masyarakat untuk membawa hasil yang telah dibuat untuk di promosikan keluar daerah. Sebab jalan utama disewakan atau digunakan sebagai akses transportasi perusahaan pertamina. Hal ini mengakibatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Sangkima tidak mengalami peningkatan kesejahteraan dikarenakan masih terdapatnya kendala yang ditemukan. Serta kurangnya kesadaran dalam pengelolaan sumber daya manusia yang mengakibatkan kualitas dari potensi tidak diperoleh.

Pemerintah diharapkan bisa lebih memperhatikan seluruh potensi yang dimiliki maupun kendala yang terjadi sehingga pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dirasakan merata oleh setiap masyarakat dan juga desa. Sehingga pemberdayaan ekonomi dapat menjadi agen perubahan untuk menjadi sebuah desa yang maju dan masyarakatnya yang sejahtera.

Potensi di Desa sangkima sangat luas dan banyak sehingga dapat dikembangkan contohnya seperti industri amplang, marning, gogos, bajabu, keripik bayam jambu air. Namun kurangnya ide-ide inovasi terbaru mengenai cara pemasaran dan pengolahan yang masih belum modern serta peran Pemerintah Desa juga tidak berfungsi dengan baik. Pemerintah Desa kurang memberikan pelatihan rutin guna untuk mengasah potensi yang dimiliki masyarakat. Selain itu pemerintah desa juga kurang melakukan pengenalan akan potensi yang ada di Desa Sangkima baik potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia dengan cara melakukan seminar di Desa. Kemudian yang menyebabkan beberapa program ini kurang berjalan dengan baik karena adanya faktor penyebab dari Desa Sangkima itu sendiri, juga dari masyarakatnya. Dari Pemerintah Desa memiliki keluhan dengan masalah status lahan kampung mereka berada di kawasan terlarang

Taman Nasional Kutai (TNK). Dengan beberapa hal diatas menyebabkan pemberdayaan ekonomi masyarakat belum benar-benar berjalan.

Memberdayakan (*empowering*)

Pelaksanaan *empowering*, Memberdayakan masyarakat dengan cara memberi bantuan modal, dukungan, pelatihan, pemasaran dan terus mengasah potensi yang ada. Pelatihan merupakan kegiatan untuk memperbaiki kemampuan kerja seorang berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Pemerintah harus terus memberikan pelatihan guna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Di Desa Sangkima sendiri bantuan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat masih kurang. Bantuan yang diberikan hanya berupa fasilitas dan penyuluhan, Adapun kegiatan penyuluhan yang pernah dilakukan yaitu dibidang pertanian, parawisata, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dilakukan secara berkala setiap tahunnya. Namun pemberian pelatihan ini harus terus dilakukan secara intens dan terjadwal dan membuat pelatihan-pelatihan sesuai dengan potensi atau bakat yang dimiliki masyarakat. Serta perlu dilakukannya *controlling* agar masyarakat tetap terus berpartisipasi dalam kemajuan mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Kegiatan yang dilakukan dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi yaitu memberikan pelatihan kepada masyarakat. Di Desa sangkima diberikan pelatihan atau penyuluhan selain itu Desa Sangkima juga menerima bantuan seperti alat dan edukasi untuk mengembangkan potensi masyarakat sebagai bentuk pendukung potensi. Masyarakat di Desa Sangkima Kecamatan Sangatta Selatan telah mendapatkan bantuan baik dari segi sarana maupun modal.

Akan tetapi masih ada masyarakat yang merasa bantuan yang diberikan pemerintah belum optimal. Sudah mengurus bantuan untuk usaha akan tetapi belum ada hasilnya. Belum

adanya bantuan yang tertuju langsung kepada masyarakat yang memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal ini tidak membuat para pengusaha mundur tetapi terus berusaha dan maju, sehingga mereka bisa mensejahterakan diri sendiri dan keluarga. Bahwa apabila program dan potensi ini berfungsi dengan baik maka dapat menjadi kekuatan bagi masyarakat itu sendiri namun tetap harus bekerjasama dengan pemerintah desa karena jika hanya salah satu yang berfungsi maka tidak akan berjalan dengan baik. Juga dibutuhkan strategi meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat itu sendiri.

Di Desa Sangkima belum ada bantuan langsung tunai untuk menambah modal masyarakat. Pembangunan di Desa Sangkima tidak terfokus kepada Pemberdayaan ekonomi melainkan lebih ke pembangunan infrastruktur Desa. Padahal kalau pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Sangkima berjalan dengan baik maka dapat membangun desa yang maju. Di desa ini juga masih kurang kerja sama antara aparat desa dengan masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi, karena tidak berjalannya pemberdayaan ekonomi di Desa Sangkima.

Memberdayakan atau *empowering* di Desa Sangkima masih banyak kekurangan dalam memberdayakan masyarakatnya seperti Sarana Prasarana yang kurang mendukung, pelatihan-pelatihan pemberdayaan yang kurang tepat sasaran, banyak potensi namun tidak diberdayakan dengan baik, akses pasar yang masih kurang, tidak adanya program pemberdayaan, minimnya pengetahuan akan teknologi dalam memasarkan dan mendesain produk. Apabila kegiatan pemberdayaan ekonomi sudah berjalan dengan baik maka pemerintah dan masyarakat desa akan merasakan dampak dari pemberdayaan ini. Selain itu apabila program dan potensi ini berfungsi dengan baik maka dapat menjadi kekuatan bagi masyarakat itu sendiri untuk lebih berdaya dan mandiri, namun tetap harus

bekerjasama dengan pemerintah desa karena jika hanya salah satu yang berfungsi maka tidak akan berjalan dengan baik. Maka dibutuhkannya strategi meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program-program desa.

Melindungi (*Protection*)

Dari hasil penelitian menurut teori Sunyoto Usman yang sesuai dengan penelitian penulis. Di Desa Sangkima fungsi melindungi belum berjalan dengan baik karena tidak adanya keterbukaan antara masyarakat dengan pemerintah desa. Para pengusaha di Di Desa Sangkima masih sangat tertutup dengan pemerintah desa, mereka tidak pernah menyampaikan keluhan dan permasalahan yang terjadi seperti persaingan harga, sehingga di Desa Sangkima Kecamatan Sangatta Selatan masih terjadi permainan harga selain itu akses yang membantu masyarakat dalam pemasaran masih kurang baik terlaksana. Minim teknologi juga membuat masyarakat bingung untuk memasarkan produk, jika ada pelatihan pemasaran secara online pasti produk-produk di Desa Sangkima tidak hanya terkenal di daerah itu saja. Akses jalan dari desa sangkima ke pusat kota, Kecamatan Kabupaten Kutai Timur tidak beaspal dan masih kurang bagus membuat masyarakat sulit memasarkan produknya karena itu merupakan jalan cepat menuju Kota sedangkan jalan yang lain harus mutar dahulu. Pemerintah desa belum fokus ke pembangunan jadi untuk pemasaran di Desa Sangkima masih kurang baik. Masyarakat masih memasarkan produknya sendiri. Belum ada tempat yang untuk memasarkan produk di Desa Sangkima. Hingga saat ini kurangnya evaluasi dari pemerintah desa sebab adanya anggapan bahwa masyarakat telah mandiri. Namun tidak adanya data statistik yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat

Hal tersebut yang kemudian membuat pemerintah desa merasa bahwa masyarakat di Desa Sangkima telah berjalan aman, Sejahtera,

dan damai karena masyarakat kurang terbuka terhadap pemerintah desa. Akan tetapi pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah desa belum sepenuhnya terlaksana secara merata dikarenakan masalah dan tidak adanya data yang jelas mengenai tingkat kemandirian masyarakat di Desa Sangkima dan kendala anggaran yang terjadi belum terdapat juga data yang secara rinci menjelaskan penggunaan anggaran tersebut. Dengan alasan masih banyaknya kebutuhan-kebutuhan desa yang belum terpenuhi dan terselesaikan seperti perbaikan akses jalan.

Pemerintah Desa tidak memfasilitasi tempat untuk memasarkan produk seperti pasar dan BUMDes dikarenakan pemerintah belum fokus terhadap pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan taraf kesejahteraan perekonomian masyarakat yang ada di Desa Sangkima salah satunya yaitu melalui program pembangunan infrastruktur. Pemerintah Desa Sangkima juga selalu berusaha untuk mempermudah akses masyarakat desa serta mempermudah pemasaran dalam jual beli yang dihadapi oleh persaingan pasar antar masyarakat.

Dalam proses pemberdayaan ekonomi di Desa Sangkima pemerintah desa tidak memberikan pengawasan dan evaluasi yang menjamin bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat berjalan dengan baik serta tidak adanya regulasi. Pemerintah desa malah menganggap masyarakatnya mandiri masyarakat di Desa Sangkima juga tidak berharap kepada bantuan pemerintah Desa hanya saja jika ada bantuan mereka menerimanya. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa masih banyak kekurangan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sehingga masih membuat Desa Sangkima kurang berkembang.

kendalanya masih kurangnya kesadaran masyarakat Desa untuk mengelola potensi yang

ada, sehingga pemberdayaan ekonomi belum maksimal berjalan.

masih banyak kekurangan yang terdapat di Desa Sangkima seperti akses jalan yang rusak, pemasaran produk, lahan Sebagian masih milik TNK, izin harus melalui kementrian, pemerintah Desa juga kurang fokus untuk program pemberdayaan sehingga menjadi kendala dalam pemberdayaan ekonomi di Desa Sangkima Kecamatan Sangatta Selatan. Harapan masyarakat semoga Desa Sangkima dapat berkembang lagi agar bisa seperti desa-desa lainnya yang ada di Kabupaten Kutai Timur.

Terkendala lahan TNK yang membuat Pemerintah Desa susah untuk bergerak, karena butuh izin dari pusat. Akses pasar yang masih di daerah situ-situ saja, BUMDes yang belum berjalan optimal kalau sudah berjalan pasti semua produk yang masyarakat buat akan dipajang dan akan dilihat oleh masyarakat luar yang ingin berpergian ke pantai, kurangnya pemahaman akan teknologi, infrastruktur yang kurang memadai seperti akses jalanan yang masih jelek apalagi kalau hujan turun, melewati akses jalan di Desa Sangkima bisa sampai terjatuh jatuh karena licin. Kurangnya keterampilan, ide-ide, inovasi dan kreativitas masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang ada, karena keterampilan merupakan salah satu faktor penunjang untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan salah satu tahap dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi. Namun di Desa Sangkima masih kurangnya kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat sehingga pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Sangkima masih kurang optimal. Namun harus tetap ditingkatkan evaluasi dari setiap kejadian dan kendala yang terjadi. Sehingga secara menyeluruh hal diatas dapat menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan ekonomi di Desa Sangkima Kecamatan Sangatta Selatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Sangkima Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan belum berjalan dengan baik mulai pemberian pelatihan yang tidak terjadwal, kurangnya pelatihan, dan kendala-kendala lahan yang semuanya harus mendapat izin dari kementrian. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Aparatur Desa harus memiliki cara kerja yang lebih efektif dalam penyusunan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan laporan-laporan peningkatan pengelolaan dan hasil potensi Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan sehingga hal ini mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- b. Pemerintah Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan harus terus memperhatikan akses penunjang pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Sangkima seperti pasar dan jalan. Agar terwujudnya proses jual beli yang maksimal.
- c. Melakukan pertemuan rutin antar aparatur desa dan masyarakat agar terjalin komunikasi yang baik dalam meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- d. Pemerintah desa harus lebih aktif bekerja sama dengan masyarakat agar pemberdayaan di Desa Sangkima lebih optimal.

REFERENSI

Books:

- Kartasmita, Ginanjar. 1997. Pemeberdayan Masyarakat: konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat. Yogyakarta : UGM
- Mardikanto Totok dan Soebiato Poerwoko, 2013. Pemberdayaan Masrakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Surakarta: Alfabeta

Soetomo. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Belajar Celeban Timur

Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(109).

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, Cet. Ke 8, h. 137.

Margayaningsih, D. I. (2018). Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa. *Publiciana*, 11(1), 72-88.

Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004. *Kemitraan dan Modul-modul Pemberdayaan*.

Yogyakarta: Gava Media

Usman, Sunyoto. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wasistiono, Sadu. 1998. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Mekar Rahayu.

Website:

<https://kutimkab.bps.go.id/publication/2021/09/24/1c2059b0b943b78bb7f4d221/kecamatan-sangatta-selatan-dalam-angka-2019.html> (diakses 16 desember 2021)

Document :

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

peraturan pemerintah No. 73 tahun 2005 tentang Kelurahan

peraturan Menteri Negri Nomor 5 Tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan

Jurnal:

Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). *Pemberdayaan masyarakat*. Deepublish.

LOMBOAN, D. V. Y., Ruru, J., & Londa, V. (2021). *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Desa Kumu Kecamatan Tombariri*